

PERBEDAAN KEMATANGAN SOSIAL DAN INTELIGENSI DARI ANAK KELAS SATU SEKOLAH DASAR YANG MELALUI BINA ANAPRASA DENGAN YANG TIDAK MELALUI PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH

P.E. Budianto, Lestari B. Soeharjono, Hanafi Mulyohardjono,
Joko Santoso Hs.

*Lab./UPF Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo, Surabaya*

LATAR BELAKANG

Keberhasilan penyelenggaraan suatu program pendidikan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta dipengaruhi oleh pelbagai aspek. Salah satu aspek yang mempengaruhi serta merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan suatu program pendidikan adalah berhasil tidaknya para penyelenggara pendidikan murid mencapai tujuan program tersebut, yaitu mengubah kemampuan para murid menjadi lebih baik (Sajono, 1983).

Namun dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak sedikit kendala yang harus dihadapi baik oleh para murid sendiri, orang tua maupun pendidik. Salah satu kendala penting yang sering dihadapi oleh para pendidik Sekolah Dasar (SD) kelas satu adalah bahwa pada umumnya murid SD kelas satu berasal dari keluarga dengan latar belakang kedudukan sosial yang rendah serta kemampuan ekonomi dan pendidikan yang kurang memadai (Ahmadi, 1991). Kurang lebih tujuh puluh lima persen di antara mereka tinggal di pelosok kota maupun pedesaan. Dari jumlah itu sekitar sembilan

puluh persen berasal dari keluarga petani kecil dan bahkan buruh tani yang berpenghasilan rendah (PKB Jatim, 1979).

Mengingat pentingnya peranan pendidikan pra-sekolah untuk mengembangkan antara lain fungsi kemampuan intelektual, sosial maupun tingkah laku anak serta memberi kesiapan bagi anak dalam menempuh jenjang pendidikan di SD, maka sudah seyogya-nyalah kalau bagi mereka disediakan sarana pendidikan pra-sekolah yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan sosial ekonomi keluarga mereka (Suyanto, 1981).

Namun pada saat ini kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan sarana pendidikan pra-sekolah yang ada didirikan dan dikelola oleh pihak swasta serta pada umumnya pengelolaannya dilaksanakan secara komersial. Sehingga hal ini tentunya tidak sesuai dengan keadaan sosio-ekonomi mereka yang tinggal di pelosok kota maupun pedesaan (PKB Jatim, 1979).

Melihat keadaan tersebut, Prof.dr. Haryono Soedigdomarto sebagai pimpinan Per-kumpulan Keluarga Berencana Indonesia cabang Jawa Timur (PKBI Jatim) bersama